

Tahta untuk Rakyat

DALAM rangka memperingati 70 tahun Sultan Hamengku Buwono IX, pada tahun 1982 terbit buku berjudul *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* (PT. Gramedia, Jakarta). Buku ini berisi kesaksian 24 tokoh nasional/ internasional mengenai peran besar Sultan Hamengku Buwono IX dalam revolusi nasional Indonesia dan masa-masa sesudahnya. Semua kesaksian mengakui dan mengagumi totalitas raja Yogyakarta ini dalam mendukung eksistensi dan perjuangan nation state baru Republik Indonesia. Tahta yang diwarisi dari leluhurnya, serta sederet jabatan baru di pemerintahan Republik, sepenuhnya diabdikan untuk rakyat.

Kini, dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2015, konsepsi *Tahta untuk Rakyat* seperti yang ditalankan oleh Sultan Hamengku Buwono IX penting dan mendesak untuk diwartalantangkan kembali. Para penyelenggara negara, yang dipercaya menduduki tahta pada level apapun harus senantiasa sadar bahwa negeri ini dibangun dalam perjuangan panjang bersendikan pada cita-cita tegaknya tatanan demokratis, tatanan yang mengindahkan kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan, serta tatanan berbasis kedaulatan rakyat. Implementasi dan aktualisasi *Tahta untuk Rakyat* (tidak sebatas formalistik dari dan oleh) dengan sendirinya harus senantiasa diupayakan.

Totalitas Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengabdikan Re-

blik (kehendak rakyat) bukanlah mitos, sebagaimana tercermin dalam kesaksian banyak tokoh penting. Mohammad Roem dan T.B. Simatupang, misalnya, melihat peran sentral Sultan bagi keselamatan Republik Indonesia yang dilahirkan oleh revolusi kerakyatan. T.K. Critchley menjuluki beliau sebagai seorang patriot unik dan Sjafruddin Prawiranegara menjuluki patriot teladan. Mohammad Natsir menyebutkan Sultan sebagai penjaga gawang perjuangan kemerdekaan, yang menurut kesaksian Rh. Kusnan secara sembunyi-sembunyi sering membagikan bantuan uang kepada para pemimpin Republik. Bahkan, Nyonya R. Moh. Hatta menyatakan uang belanja pemberian Sultan saat ibukota RI ada di Yogyakarta masih tersimpan sebagai kenangan.

Pada saat kemerdekaan diproklamasikan, Sultan baru lima tahun menduduki tahtanya. Namun, beliau merupakan pemimpin monarkhi yang cepat tanggap terhadap perubahan seperti dikemukakan oleh Julius Tahija. Menurut pengalaman A.R. Baswedan, Sultan bukan hanya raja yang terbuka bagi perubahan, tetapi juga tegas dalam prinsip. Ketegasan prinsip dan kesetiiaannya kepada Republik untuk mengikuti arus besar kehendak rakyat membikin Belanda gagal merayunya untuk berpihak kepadanya kendatipun dengan janji kekuasaan wilayah yang jauh lebih besar dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seka-

rang. Oleh karena itu, seorang sejarawan sekaliber George Mc T. Kahin pun kagum kepadanya.

Rasa hormat terhadap integritas keindonesiaan dan kerakyatan Sultan juga datang dari A.H. Nasution, Prof. Dr. Moestopo, Frans Seda, A.C. Brackman, dan Rosihan Anwar. Frans Seda menjuluki Sultan sebagai negarawan berwibawa tanpa pamrih; sederhana dalam hidup, demokratis dalam sikap, dan tanpa pamrih dalam bakti. Dengan gayanya yang khas, Rosihan Anwar memberi judul kesaksiannya: "Bung Sultan yang Demokratis", yang oleh Brackman dinarasikan sebagai "Seorang Jawa yang Besar, Seorang Indonesia yang Besar, Manusia Berjiwa Besar". Meskipun berstatus sebagai seorang raja dari sebuah wangsa feodal yang sedemikian panjang, banyak bukti menunjukkan kuasanya visi kebangsaan, kerakyatan, dan kemanusiaan yang berhasil dibangun secara konsisten oleh Sultan Hamengku Buwono IX.

Memang Sultan Hamengku Buwono IX pada masa mudanya tidak tercatat dalam barisan kaum nasionalis pemutar roda gerak organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan. Namun, keberpihakannya kepada rakyat telah tampak pada zaman pendudukan Jepang. Pembangunan selokan Mataram merupakan bukti kuat Sultan dalam upaya memfasilitasi kemakmuran rakyat sekaligus menghindarkan mereka dari proyek eksploitasi tidak manusiawi

romusha Jepang. Perguliran nasionalitas demokratisnya dalam konteks *nation state* Indonesia juga tidak perlu menanti lebih dari satu hari dari saat proklamasi kemerdekaan. Langkah ini bukan pertama-tama bagian dari kalkulasi politik kekuasaan, tetapi bagian dari transformasi cara pandang dan cara tindak terhadap eksistensi rakyat, yang meski "senyap" telah dibangun lama. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap keselamatan Republik pada masa revolusi dan perjalanan panjang berikutnya hingga era Orde Baru sedemikian nyata.

Melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, memfasilitasi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, dan dengan kebijakan-kebijakan khusus memperhatikan yang lemah, pada hakikatnya merupakan tugas negara. Rakyat adalah sumber kekuasaan; dan oleh karena itu, kekuasaan harus diabdikan kepada rakyat. Indonesia yang telah 70 tahun merdeka harus benar-benar dapat menjadi rumah rakyat, bukan tempat dimana rakyat dijadikan objek kekuasaan setelah kekuasaan diperoleh secara manipulatif darinya. Agar *Tahta untuk Rakyat* terwujud, maka semua amanat UUD 1945 harus berjalan. Lebih lanjut, agar amanat UUD 1945 dijalankan oleh negara, maka rakyat atau warga negara harus mau dan mampu mengawalinya. Keberdayaan politik rakyat akan menentukan tingkat capaian *Tahta untuk Rakyat*. ***

Dr. Anton Haryono MHum, Ketua LPPM USD Yogyakarta.